

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

TRIVENA ANGELICA

NPM 2056041007



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

TRIVENA ANGELICA

2056041007

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

TRIVENA ANGELICA

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu kebijakan yang menjadi bagian dari sistem informasi, dengan tujuan menerapkan teknologi informasi dalam proses penginputan data dan informasi perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan SIPD ini dalam membantu Bapperida Kota Bandar Lampung sebagai admin pelaksana untuk mengkoordinasi pemerintah daerah dalam pengimplementasian SIPD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan Thomas B Smith yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Data penelitian berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Pemanfaatan SIPD dapat menjadi pemecah masalah dengan mempermudah perencanaan pembangunan, karena dengan adanya SIPD data-data dapat di masukkan dengan mudah ke dalam sistem tersebut juga membantu dan mempermudah Bapperida serta OPD lainnya dalam memilih usulan-usulan prioritas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Bapperida sudah menjalankan tugasnya dengan baik agar implementasi SIPD ini berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, tetapi masih terdapat kendala pada sumber daya manusia yang ditunjuk untuk mengimplementasikan SIPD tersebut.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan, Koordinasi Antar Pihak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) POLICIES IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY BANDAR LAMPUNG CITY

BY

TRIVENA ANGELICA

The Regional Government Information System (SIPD) is one of the policies that is part of the information system, with the aim of implementing information technology in the process of inputting data and development planning information. This study aims to determine the extent to which the implementation of this SIPD policy is in assisting Bapperida of Bandar Lampung City as the implementing admin to coordinate the local government in implementing SIPD. This study uses a qualitative approach with data analysis using Thomas B Smith's policy implementation theory, namely idealized policies, target groups, implementing organizations and environmental factors. Research data comes from interviews, documentation and observations. The use of SIPD can be a problem solver by facilitating development planning, because with SIPD data can be easily entered into the system and also helps and facilitates Bapperida and other OPDs in selecting priority proposals. The results of this study found that Bapperida has carried out its duties well so that the implementation of SIPD runs in accordance with the policies that have been made, but there are still obstacles in the human resources appointed to implement SIPD.

Key Words : *Policy Implementation, Regional Government Information Systems, Development Planning, Coordination Between Parties*

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Trivena Angelica

Nomor Pokok Mahasiswa : 2056041007

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

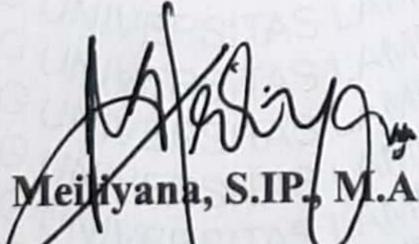
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Bambang Utoyo S. M.Si
NIP 19630206 198803 1 002

Nana Mulyana, S.IP., M.Si
NIP 19710615 200501 1 003

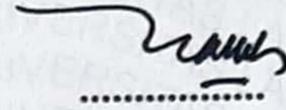
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

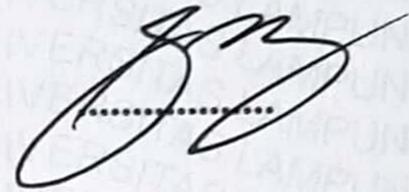
Ketua : **Dr. Bambang Utoyo S. M.Si**



Sekretaris : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si**



Penguji Utama : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP 196108071987032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi lain.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Angelica
NPM. 2056041007

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2001. Dibesarkan dalam keluarga sederhana dari Bapak Baringin Simanjuntak dan Ibu Esther Hutauruk, SH dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan memiliki seorang kakak perempuan bernama Trysha Marta Landiana.

Tahun 2006, Penulis mengawali pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Tunas Jakarta diselesaikan tahun 2007, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Ragunan Pagi diselesaikan tahun 2013, dilanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP NEGERI 218 JAKARTA diselesaikan tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK NEGERI 15 JAKARTA dengan jurusan Administrasi Perkantoran dan diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis tidak lolos PTN sehingga Penulis mengambil kesempatan untuk bekerja dahulu di salah satu perusahaan ritel sebagai kasir, dan pada tahun 2020 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru melalui jalur Seleksi SMMPTN BARAT 2020 di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung hingga saat ini.

Selama menjadi mahasiswa Penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada didalam kampus. Mulai dari kegiatan organisasi mahasiswa dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA), Persekutuan Doa Oukumene (PDO) FISIP, dan juga kegiatan-kegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UKM Kristen Universitas Lampung Pada Januari 2023 Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Selanjutnya pada Februari hingga Agustus 2023 Penulis telah melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur

(Filipi 4 : 6)

Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan!

(Yeremia 17:7)

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.

(Matius 6:34)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena karunia dan berkatNya kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Bapake dan Momsky tercinta

Baringin Simanjuntak dan Esther Hutaaruk, S.H

Kakak Trysha Martha Landiana, S.E ; Abang Ipar Bryan Yosegawa, S.E

Keponakan tersayang Ezra Mosha Pardamean Yosegawa

Terimakasih atas semua pengorbanan mama dan papa, segala doa, semangat, dukungan, kasih sayang, perjuangan, dan kesabaran yang telah diberikan sepanjang hidupku sampai untuk keberhasilanku.

Terimakasih telah memotivasiku agar terus berjuang untuk mencapai gelar ini.

Almamaterku

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji Syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karuniaNya, berkat hikmat makrifat serta pertolonganNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk keluarga tercintaku, Bapake, Momsky, terimakasih telah menjadi kedua orangtua yang sangat terbaik sepanjang kehidupanku, terimakasih sudah mendukung dan selalu percaya atas apa yang adek ambil dan lakukan. Terimakasih sudah menjadi rumah ternyaman untuk anakmu ini, terimakasih atas pengorbanan bapake dan momsky untuk anak siapudanku ini.
2. Kepada kakak kandung satu-satunya, Bunda terimakasih sudah menjadi kakak sekaligus tempat berkeluh kesah, terimakasih kepada abang ipar Bryan dan ponakan kesayangan nanju abang Ezra, terimakasih atas bantuan kalian selama ini.
3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S. M.Si., selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, saran dan nasehat yang berharga diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bapak telah sabar membimbing penulis, tanpa bantuan bapak itu tidak mungkin skripsi ini dapat sampai pada tahap ini.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing pembantu sekaligus dosen pembimbing akademik penulis. Terimakasih atas ilmu, waktu, saran dan nasehat yang berharga diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas kesempatan selama bimbingan.
5. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terimakasih untuk semua kritik dan saran yang sangat membangun dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi menjadi lebih baik.

6. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh staff dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan menjalankan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak Ibu Gembala GPDI Antiokhia, kak yudhi dan kak moudy atas bantuannya sehingga penulis bisa berkuliah sampai selesai, terima kasih untuk semua bantuan yang kalian berikan ke keluarga penulis
12. Seluruh Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Terutama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) Opung ibu tersayangku, ka niken kakakku, oti, bu kokom, bu diona, pak intji, mba indah, bu dar, bu diah, bu reni, bu puspita, bu yuli, pak ari, terlebih khusus untuk bapak diding yang sudah merekomendasikan judul serta membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian pak ghandi, pak oji, ka niko, mba meka, mba santi terima kasih sudah membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian skripsi ini berlangsung.
13. Kepada teman-teman ADAMANTIA angkatan 2020, terimakasih untuk setiap momen suka dan duka selama perkuliahan dan kepanitiaan HIMAGARA yang telah kita lalui bersama, terikasih untuk pertemanannya terutama teman-teman yang sampai saat ini menjadi teman dekat penulis, terimakaish raja kurnia, empit, diki, firdi, jeje, rintut, melisa, vikoy, ajul, dinda, jumz, rizki, raihan, yanuar, yuris, fefe, depoy, esa, indra.

14. Terimakasih kepada bestie sist sarah dan juga iban dapit yang menjadi teman seiman selama perkuliahan. Terima kasih kepada ka jere yang sudah menemani penulis pada saat itu.
15. Kepada mba abang Himagara yang telah membimbing penulis, bang alip, bang ndung, ayah jono, bunda vero, ka dea, kak junia dan mba azra
16. Kepada Jessica Maheratiarna br. Ginting, sahabat penulis dari awal merantau sampai detik ini. Terimakasih jesi sudah mau bertahan untuk berteman dengan penulis, selalu bersama kemanapun, terimakasih kesetiiaannya sudah menemani penulis selama susah, sedih, dan senang.
17. Kepada Rintha dan Fitria yang membersamai penulis dalam masa perkuliahan terlebih dalam masa masa menjadi mahasiswa akhir, terima kasih sudah bersama sama mengurus masa skripsi kita.
18. Kepada Wardah Nurul Azizah, teman semasa sekolah yang sampai saat ini masih menjadi yang terbaik. Terimakasih atas dukungan, nasehat yang diberikan kepada penulis selama penulis merantau, terimakasih sudah menjadi teman cerita.
19. Kepada seluruh keluarga besar Simanjuntak. Terimakasih untuk papi mami yang sudah penulis repotkan selama ini, terimakasih atas didikan dan menjadi wali orangtuaku selama di Lampung ini. Terimakasih juga untuk persepupuan juntak yang sudah memberikan dukungan makjer, pakjer, bang misael, cece, bang im, bang ul, ka uut, seli, karin, misela, rafael, juga bapaktua bandar dan ponakan aunty jere, jou, michael.
20. Kepada keluarga dari mama, terlebih khusus untuk mamabus sudah menjadi mama yang baik dan menjagaku selama merantau, mimi uli, alm. ayuk meytha yang selalu ada dimasa awal penulis merantau, ayuk berththa atas tumpangan tinggalnya, abang ian, ponakan tersayang nanju abang eel.
21. Teman-teman yang ada di Jakarta, teman SMK Meenggank meli, mas maul, bastoen, ega, aca, warcile, depi. Juga untuk lahbagen jelang, andre, ka aji, ka petruk. Terimakasih untuk diaz dan terimakasih untuk adik-adikku seiman bilo dan angeline serta ka kezia. Terlebih untuk aa toushi, terimakasih sudah menjadi teman dan abang yang tiada henti mengingatkan penulis dan menasehati serta menjadi teman curhat semasa SMP sampai sekarang.

22. Kepada Pemuda GPdI Maranata Wates, seli, silpot, pebong, kezia, ka ut, bang pet, andre, mesakh, bang pincen, nathan dwi yang telah menjadi teman seiman dan telah berteman selama penulis merantau.
23. Kepada keluarga Vion Cafe, ce vini ce via, pak alan, tetew, wayan, ka dinan, biul, ka amoy, wahyu, jeng riskul, ka ade, ibu, bapak, ka farhan, mba iyus, ka erick, dapide, mba sherly, mas ari, ka april sudah mengisi waktu luang penulis sampai saat ini
24. Kepada Yehezkiel Ngantung. Terimakasih sudah hadir dan bertahan dari 2021 untuk menjadi orang tersayang penulis, untuk menjadi orang yang selalu ada disaat situasi apapun, untuk didikan dan kesabaran menghadapi keanak-anakan penulis. Terimakasih sudah menjadi orang yang pertama dalam segala hal penulis lakukan dan rasakan. Terimakasih sudah mengajari, menyayangi, menjaga, dan mencintai penulis selama ini.
25. Dan terima kasih kepada diriku, Trivena Angelica Simanjuntak. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini, banyak proses yang telah kamu lalui, terima kasih sudah kuat melewati lika liku perjalanan yang sulit ini. Maaf untuk memaksakan diri ini untuk bertahan, berharap kedepannya seorang Trivena ini bisa terus bertahan hidup dengan lebih berserah dan mengandalkan Tuhan.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2024

Penulis

Trivena Angelica

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi.....	11
2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan.....	11
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan	13
2.3.3 Fungsi Implementasi	21
2.4 Sistem Informasi	22
2.5 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	23
2.6 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.2.1. Capaian Implementasi Kebijakan.....	29
3.2.2. Variabel Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Karakteristik Wilayah Penelitian.....	37
4.2 Gambaran Umum.....	39
4.2.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi	39
4.2.2 Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	40
4.2.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	41
4.2.4 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	43
4.2.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	45
4.3 Hasil Penelitian	46
4.3.1 Capaian Implementasi Kebijakan.....	47
4.3.2 Variabel Implementasi Kebijakan.....	50

4.3.3	Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	66
4.4	Hasil Pembahasan	70
4.4.1	Capaian Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).....	71
4.4.2	Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).....	73
4.4.3	Faktor Penghambat Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	82
V.	SIMPULAN DAN SARAN	84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. Data Informan Wawancara dalam Penelitian	33
Tabel 3. Dokumen yang dijadikan bahan analisis	33
Tabel 4. Data Kelompok Sasaran	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Contoh <i>Error</i> Saat Penginputan Data Ke SIPD	5
Gambar 2. Kerangka Pikir	27
Gambar 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung	40
Gambar 4. Struktur Organisasi BAPPERIDA Kota Bandar Lampung	42
Gambar 5. Sejarah Perkembangan SIPD	49
Gambar 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah	52
Gambar 7. Diskusi antara BAPPERIDA dengan OPD Dalam penginputan data ke SIPD	55
Gambar 8. Lampiran Susunan Tim Pelaksana Penerapan SIPD	58
Gambar 9. Pengajaran kepada OPD untuk mengimplementasikan SIPD.....	60
Gambar 10. Tampilan Awal SIPD.....	61
Gambar 11. Halaman SIPD setelah login	61
Gambar 12. Halaman Penginputan Rencana Kerja.....	62
Gambar 13. Halaman Setelah Penginputan Rencana Kerja.....	62
Gambar 14. Group Whatsapp Konsultasi Bappeda dengan Operator OPD.....	63
Gambar 15. Jadwal Penginputan Dokumen ke SIPD	67
Gambar 16. Ruang Bidang Rendalev yang mempunyai 2 komputer.....	68

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan suatu negara. Perencanaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah (Lumbantobing, 2022). Perencanaan dalam proses pembangunan akan memudahkan dalam mengetahui apa yang ingin dicapai dan dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan dengan tujuan untuk menuju arah perbaikan dan peningkatan yang didasarkan pada kebutuhan dari tiap-tiap daerah (Yunas, 2017).

Aspek penting dalam perencanaan termasuk pemilihan strategi, alokasi sumber daya, pencapaian tujuan, dan implementasi kegiatan yang berkelanjutan. Pembangunan didefinisikan sebagai usaha untuk memajukan dan mengubah kondisi yang ada menjadi lebih baik, melalui proses yang disengaja oleh pemerintah dengan tujuan akhir modernisasi dan pembangunan bangsa.

Proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah diwajibkan oleh undang-undang terkait pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan yang efektif, yang menekankan pada koordinasi, sinergi, dan harmonisasi antar instansi pemerintah daerah yang berperan dalam perencanaan pembangunan lokal. Efektivitas perencanaan pembangunan meningkat dengan dukungan data dan informasi yang akurat, yang

digunakan sebagai dasar dalam merancang dan mempercepat proses pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dari tingkat bawah sampai pemerintah pusat. Pemerintah memerlukan sebuah kemampuan yang bisa membantu menjalankan pembangunan, salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (Riska, 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi dengan membentuk database daerah dengan tujuan agar pemerintah pusat dapat mengakses potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Adanya database daerah yang kuat diharapkan dapat mendukung peningkatan sistem informasi, memudahkan pengelolaan data, dan menjadi dasar analisis perencanaan serta pembangunan daerah secara nasional (Laudy, 2020).

Melalui Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat berupaya untuk mengoordinasikan perencanaan pembangunan dengan sebuah wadah yang akan digunakan pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Riska, 2022). Pemerintah merumuskan kebijakan elektronik yang dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien juga yang berkualitas terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan ini hadir agar pemerintah daerah bekerjasama dan berkomitmen dalam mengumpulkan dan menghasilkan data yang akurat serta tepat waktu sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah, maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintah Daerah (Lumbantobing, 2022). Pelaksanaan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 ini juga untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Manurung et al., 2019).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 memberikan definisi dan penjelasan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Menurut Pasal 1 angka 12, Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah yang mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah yang saling terkait, digunakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pasal 1 angka 15 lebih lanjut merinci bahwa informasi pemerintah daerah adalah suatu sistem untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, termasuk analisis dan profil pembangunan daerah.

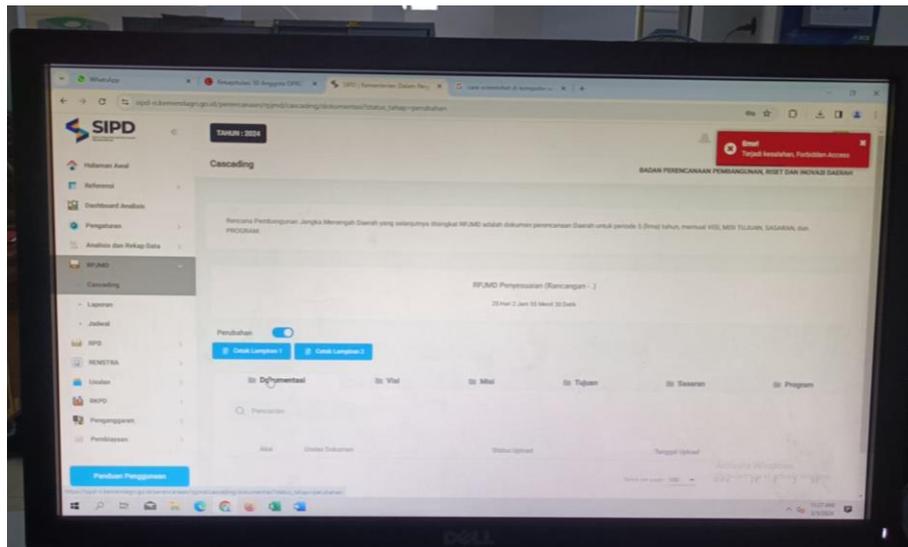
Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa informasi pemerintah daerah mencakup tiga aspek, yaitu data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah, serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola melalui sistem berbasis elektronik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019).

Kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong pembentukan sistem data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan baik ditingkat daerah maupun pusat. Salah satu fokus utama kebijakan ini adalah meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap pola kerjasama berbasis data dan informasi. Tujuannya adalah membangun database ditingkat daerah yang dapat secara akurat mencerminkan potensi dan sumber daya setiap daerah. Langkah ini diarahkan untuk mendukung

pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid (Dela & Juliana, 2022).

Dalam hal ini, maka pemerintah pusat menunjuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (BAPPERIDA) sebagai organisasi pelaksana atau admin perencanaan dari SIPD. BAPPERIDA adalah lembaga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tugas dari BAPPERIDA yaitu merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknik pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Maka, menjalankan sistem ini harus memerlukan kerjasama serta koordinasi yang baik dari setiap instansi yang terlibat.

Sebelum penggunaan SIPD, BAPPERIDA mengalami kesulitan karena proses penyusunan dilakukan secara manual menggunakan *excel* yang datanya diinput secara manual sehingga datanya tidak terpantau secara langsung. Selain itu, pengumpulan data yang cenderung kurang efisien karena seringnya tidak *ontime* terlebih dalam pengumpulan data oleh dinas besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas kesehatan karena banyak data dan kegiatan. Masalah lain yang dihadapi pada saat sebelum menggunakan SIPD yaitu adanya perubahan/tambahan kegiatan ditengah jalan sehingga mengharuskan BAPPERIDA mengubah secara manual dokumen perencanaan.



Gambar 1. Contoh *Error* Saat Penginputan Data Ke SIPD

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

Setelah menggunakan SIPD, data lebih lengkap dan tersusun rapi, kemudian dengan adanya target waktu pengumpulan data sehingga OPD mau tidak mau untuk segera menginput data. Tetapi dari pengamatan penulis, masih adanya masalah saat mengimplementasikan SIPD ini, seperti kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan SIPD dikarenakan tidak adanya sosialisasi penerapan aplikasi ini, dan jaringan yang kurang stabil membuat penginputan terhambat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Ferdiana dan Eva (2022) tentang Efektivitas Sistem *E-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mengemukakan bahwa sistem *e-planning* ini adalah wujud dari tata kelola yang baik melalui *e-governance*. *E-planning* ini disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah dilakukan di Bappeda Tulungagung dan secara penelitian sistem ini sudah efektif dilakukan untuk memberikan informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah, akan tetapi masih terdapat faktor penghambat dalam mengimplementasikan sistem tersebut.

Di lain sisi, Reni (2021) melakukan penelitian terdahulu tentang Pemanfaatan SIPD untuk Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa di Bappeda Kabupaten Deli Serdang mengemukakan bahwa musrenbang ini terkoordinasi dengan baik melalui penerapan SIPD untuk merumuskan, memilah, dan menyusun hasil musrenbang. Berdasarkan fenomena yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian, dan juga dari beberapa peneliti terdahulu, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana implementasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, apa yang menjadi penghambat Bappeda Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan SIPD ini. Oleh karena itu peneliti akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya, yaitu :

1. Bagaimana implementasi SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja kendala yang menghambat saat penerapan SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana BAPPERIDA dalam mengimplementasikan SIPD.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menghambat pada penerapan SIPD di BAPPERIDA Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan menambah wawasan informasi tentang program SIPD bagi instansi pemerintah, khususnya BAPPERIDA dengan perangkat daerah lainnya dalam menggunakan dalam menerapkan SIPD pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah.
2. Manfaat praktis bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan dimana peneliti berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan dengan menggunakan metode ilmiah yang baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis baik dari segi konsep maupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolok ukur atau acuan dalam menyelesaikan penelitian ini nantinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1.	Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kota Dumai (Studi Kasus Pada Aplikasi E Planning). (Lusi Andriani, 2021)	Penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Penggunaan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ternyata masih terdapat penghambat seperti urangnya fasilitas tata ruang serta titik koordinat.	Perbedaan penelitian terletak pada teori penelitian, dalam penelitian Lusi menggunakan teori Subarsono terdiri dari 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan system birokrasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Thomas B Smith

<p>2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Reni Kesuma Putri, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang menunjukkan penerapan SIPD pada musrenbang desa bisa dengan baik dilaksanakan. Karena jauh sebelum proses penginputan usulan musrenbang dilakukan, pihak Bappeda Kabupaten Deli Serdang sudah memberikan bimbingan teknis terkait dengan cara input usulan program di aplikasi SIPD.</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan SIPD dalam proses Musrenbang tingkat desa, sedangkan penelitian ini membahas implementasi SIPD dalam perencanaan di Bappeda Kota Bandar Lampung.</p>
<p>3. Efektivitas Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung) (Ferdiana dan Eva, 2022)</p>	<p>Penelitian disamping menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas sistem berdasarkan teori Aprilia, Wijaya, dan Suryadi (2014:130) yaitu mencakup peran website, peran pemerintah, tujuan, jangkauan akses, content, dan interaksi.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini terletak pada teori penelitian, dalam penelitian Ferdiana dan Eva menggunakan teori Aprilia, Wijaya, dan Suryadi tentang efektivitas website. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Thomas B Smith dengan 4 indikator yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.</p>

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023)

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas yang pada dasarnya semua berfokus pada aplikasi SIPD. Meskipun beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, akan tetapi penelitian ini memiliki subjek, metode dan tempat penelitian yang berbeda dalam mengkaji implementasi SIPD.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan juga sebagai pemecah dari suatu permasalahan dengan menggunakan tahapan waktu tertentu. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai landasan pemerintah bertindak dalam usaha memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Dunn (dalam Tacjhan, 2006) bahwa kebijakan publik adalah sebuah rangkaian pilihan yang memiliki keterikatan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah yang berkaitan dengan tugas pemerintah menyangkut masyarakat seperti kriminalitas, perkotaan, dan lain sebagainya.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan juga menjalin hubungan antar pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan, sehingga setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik secara kelembagaan maupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Kebijakan publik pada dasarnya memiliki dua kutub pandangan, pandangan pertama yang mengidentikkan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pandangan kedua yang memusatkan perhatian pada bagaimana sebuah kebijakan publik diimplementasikan. Kebijakan publik juga memiliki ruang lingkup kebijakan publik yang terdiri dari studi-studi muatan kebijakan, studi-studi tentang proses kebijakan, studi-studi tentang *output* kebijaka, syudi-studi evaluasi, studi informasi untuk pembuat kebijakan, proses kepenasehatan, nasehat kebijakan (Novita,2017).

Kebijakan publik juga didefinisikan menurut Charles O Jones dalam Thacjan (2006) menggambarkan kebijakan publik sebagai hasil dari proses politik dan administratif yang kompleks. Jones menekankan pada

kompleksitas proses di balik pembentukan kebijakan publik. Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Thacjan (2006) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan yang diambil oleh aktor politik atau sub-aktor dalam suatu sistem politik yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Anderson menyoroti proses pembuatan keputusan dalam kebijakan publik dan fokus pada pencapaian tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.3 Implementasi

2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, biasanya implementasi ini dikaitkan dengan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan yaitu proses administrasi yang berlangsung setelah suatu kebijakan diputuskan. Keberhasilan setiap kebijakan atau aktivitas pengambilan keputusan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Proses ini terjadi pada tahapan setelah penetapan kebijakan, implementasi menggunakan logika *top-down* artinya menyederhanakan alternatif yang abstrak (makro) menjadi alternatif yang konkrit (mikro) sedangkan disisi lain implementasi menggunakan logika *bottom-up* artinya kegiatan dimulai dari pemetaan keperluan publik kemudian alternatif pemecah masalah dicari lalu diusulkan untuk ditetapkan sebagai kebijakan (Tachjan, 2006).

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Wahab dalam Riska, 2022). Dari pernyataan Grindle (Novita, 2017) bahwa implementasi adalah proses umum tindakan pengelolaan yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Proses implementasinya dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan yang telah disiapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan yang telah tersedia. Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, banyak faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah-ubah (Ariska, 2019).

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Rizka, 2022) implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang atau perintah penting atau keputusan penting yang dimana proses implementasi ini berlangsung setelah melalui tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan sampai pada perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Berdasarkan perspektif Edwards III (Azra, 2022) bahwa implementasi diperlukan adanya masalah kebijakan yang harus diatasi, sehingga Edwards III memperkenalkan pendekatan untuk masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan dari sebuah kebijakan tersebut.

Tujuan dari penerapan kebijakan dituangkan dalam bentuk program aksi dan proyek yang telah dirancang dan mendapatkan pembiayaan. Program tersebut dijalankan sesuai dengan rencana yang ada. Secara umum, proses penerapan kebijakan atau program dipengaruhi oleh isi dari kebijakan itu sendiri serta konteks saat implementasi berlangsung. Evaluasi dari keseluruhan proses penerapan kebijakan dilakukan dengan mengukur hasil dari program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Hasil dari program tersebut diamati melalui pengaruhnya

terhadap target yang diinginkan, baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Hasil akhir dari penerapan kebijakan ini adalah terjadinya perubahan serta penerimaan perubahan tersebut oleh target sasaran (Novita, 2017).

Program adalah elemen pertama yang harus ada untuk menyelesaikan kegiatan implementasi. Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat dapat terlibat dan mencapai hasil dari pelaksanaan program serta membawa perubahan. Program tersebut dikatakan tidak bisa terlaksana jika tidak membawa manfaat apapun bagi masyarakat setempat. Keberhasilan implementasi suatu program tergantung pada faktor implementasi (eksekusi). Pentingnya pelaksanaan karena baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Ariska, 2019).

Dari beberapa definisi implementasi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok atau organisasi atau pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan, sehingga diperlikannya kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya, maupun objek yang dipakai dalam membantu mencapai tujuan tersebut.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang akan diimplementasikan memiliki beberapa model yang menjadi rancangan atau acuan guna melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam Buku Kebijakan Publik (Novita, 2017) ada beberapa model implementasi secara teori adalah sebagai berikut:

1. Model Implementasi George C. Edwards III

Edward III mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu prasyarat keberhasilan implementasi dan apa hambatan utama keberhasilan implementasi. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut maka

terbentuklah empat faktor atau variabel yang merupakan syarat terpenting bagi keberhasilan proses implementasi. Keempat faktor tersebut adalah:

- a. Komunikasi. Dalam hal ini, keputusan dan peraturan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh aktor terkait sehingga mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan. Ada tiga indikator untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi: penyampaian, kejelasan, dan konsistensi.
- b. Sumber Daya. Menurut Edward III, untuk melaksanakan suatu kebijakan, indikator sumber daya mencakup sejumlah indikator seperti personel, informasi, kewenangan, dan fasilitas.
- c. Disposisi atau tata letak. Sikap atau komitmen yang tinggi dalam melaksanakan sebuah implementasi kebijakan atau program yang harus dilaksanakan agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.
- d. Struktur birokrasi. Variabel keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Diperlukan fragmentasi untuk menjadikan proses implementasi ini menjadi jauh dari efektif.

2. Model Implementasi Hogwood dan Gunn

Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan beberapa syarat, diantaranya adalah:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana.
- b. Tersedia waktu dan sumber daya.
- c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan.
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausal yang handal.
- e. Hubungan kausalitas yang kompleks.
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.
- g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.

- h. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang baik.
- j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik,
- d. Dan kecenderungan pelaksana/implementor.

4. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Model ini merupakan kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keberagaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel intervening, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hiererkis diantara pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar.
- c. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, seperti pemahaman dari lembaga atau badan

pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

5. Model Implementasi David C Korten

David C Korten (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) menegaskan bahwa model implementasi kebijakan atau program ini memakai pendekatan proses pembelajaran. Suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu:

- a. Kesesuaian antara program dan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan program dengan apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- b. Kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

6. Model Implementasi Grindle

Model ini untuk mengukur keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan yang ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya (Arif, 2018). Dalam model ini terdapat dua variabel yang dijadikan alat ukur. Isi kebijakan mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) apakah letak pengambilan keputusan sudah tepat; (5) siapa pelaksana program, dan (6) apakah sumber daya memadai dalam mendukung

kebijakan. Sedangkan konteks implementasi mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

7. Model Implementasi Charles O Jones

Charles O Jones menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama, yaitu: (1) organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan; (2) interpretasi atau pemahanan, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; (3) aplikasi atau penerapan, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa (Nuryanti, 2015).

8. Model Implementasi Thomas B Smith

Model implementasi Thomas B Smith mempunyai empat variabel dalam mengimplementasikan kebijakan (Tachjan, 2006) yaitu:

a. Kebijakan yang diidealkan

Merupakan pola interaksi ideal yang didefinisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. Dalam prospek implementasi kebijakan yang efektif ditentukan melalui komunikasi yang akurat dan koordinasi yang konsisten. Jika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan, atau jika sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan, maka pelaksanaan kebijakan akan sulit dilakukan secara intensif.

Thomas B. Smith menguraikan beberapa kategori penting yang relevan dengan implementasi kebijakan yang diidealkan, dengan

fokus pada keterkaitan antara formulasi kebijakan dan pelaksanaan praktisnya. Berikut adalah kategori utama seperti yang dijelaskan :

1. Kebijakan Formal: Ini mengacu pada dokumen atau kerangka kebijakan resmi yang menguraikan tujuan, pedoman, dan aturan implementasi. Hal ini mencakup standar dan harapan yang ditetapkan dengan jelas oleh para pembuat kebijakan. Implementasi yang efektif bergantung pada ketepatan dan kejelasan kebijakan formal tersebut.
2. Jenis Kebijakan: Berbagai jenis kebijakan memerlukan pendekatan implementasi yang berbeda pula. Kebijakan dapat sangat bervariasi dalam sifat, ruang lingkup, dan mekanisme yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Misalnya, kebijakan peraturan mungkin memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang ketat, sedangkan kebijakan sosial mungkin lebih fokus pada pemberian layanan dan keterlibatan masyarakat.
3. Citra Kebijakan: Hal ini mencakup bagaimana kebijakan tersebut dipandang oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pelaksana, dan kelompok kepentingan lainnya. Citra atau persepsi terhadap kebijakan dapat mempengaruhi penerimaan dan efektivitasnya secara signifikan. Persepsi positif dapat memfasilitasi implementasi yang lebih lancar, sedangkan persepsi negatif dapat menimbulkan hambatan dan tantangan.
4. Pola Interaksi Ideal: Menurut Smith, pola interaksi ideal antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangatlah penting. Hal ini mencakup saluran komunikasi yang jelas, kerja sama antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga, serta pembentukan kepercayaan dan saling pengertian. Pola interaksi ini membantu menyelaraskan upaya seluruh pemangku kepentingan menuju tujuan bersama yang ditetapkan oleh kebijakan.

b. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran ialah mereka yang paling dipengaruhi oleh kebijakan dan harus mengadopsi pola interaksi sebagaimana diharapkan oleh perumusan kebijakan. Kelompok sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada :

1. Kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka.
2. Karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi.
3. Komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.

c. Organisasi Pelaksana

Adalah badan-badan pelaksana atau unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan bisa berupa organisasi atau individu yang bertugas mengelola, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan di lapangan. Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Thomas B Smith, ada 3 karakteristik organisasi pelaksana agar implementasi kebijakan tercapai.

1. Struktur dan personil, dimana Smith menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, komunikasi yang efisien dan memfasilitasikan koordinasi antar bagian organisasi secara baik. Pelatihan berkelanjutan untuk

kelompok sasaran agar mereka dapat mengikuti dan mengatasi tantangan selama implementasi kebijakan.

2. Pemimpin organisasi administrasi, dimana pemimpin harus mahir dalam pengambilan keputusan strategis, dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, dapat merespon dengan cepat jika ada perubahan dan memiliki otoritas yang cukup untuk mengkoordinasikan dengan organisasi yang terlibat.
3. Pelaksanaan program dan kapasitas, dimana sumber daya harus dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai aktivitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Pengembangan kapasitas melibatkan kemampuan organisasi melalui pelatihan, teknologi baru, dan proses inovatif untuk memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi tuntutan implementasi kebijakan.

d. Faktor Lingkungan

Dalam menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan kebijakan publik. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan menurut Thomas B Smith:

1. Lingkungan politik : Dalam hal ini dukungan pemerintah sangat mengambil peran dari memfasilitasi alokasi sumber daya dan koordinasi yang lancar untuk berbagai lembaga.
2. Lingkungan ekonomi : Dalam hal ini ketersediaan sumber daya keuangan, jika pendanaan stabil akan mengurangi resiko kekurangan dana mendadak yang dapat mengganggu pelaksanaan
3. Lingkungan sosial : Dalam hal ini faktornya seperti nilai-nilai budaya, dan jaringan sosial dapat memfasilitasi atau menghambat efektifitas dari kebijakan tersebut.

2.3.3 Fungsi Implementasi

Fungsi implementasi yaitu:

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan
2. pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif
3. dan efisien dalam pencapaian tujuan.
4. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
5. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
6. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2.4 Sistem Informasi

Menurut Indrajit dalam Eka Putra (2023), sistem didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling terkait satu sama lain. Jogianto menambahkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini merepresentasikan peristiwa nyata yang melibatkan objek-objek konkret seperti tempat, barang, dan orang yang benar-benar eksis dan berinteraksi. Oleh karena itu, sistem bisa dipahami sebagai rangkaian prosedur yang terhubung satu sama lain, berkumpul untuk menjalankan aktivitas atau mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem, yang fokus pada jaringan kerja prosedur, lebih menekankan pada urutan dan tata cara dalam sistem tersebut.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang menghasilkan output dan berdampak pada keputusan atau tindakan yang akan diambil. Proses ini melibatkan siklus di mana data diproses menjadi output yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, sumber data haruslah dapat diandalkan. Dengan demikian, informasi adalah data yang telah diolah menjadi format yang lebih praktis dan signifikan bagi yang menerimanya (Eka Putra, 2023).

Sistem informasi mengacu pada data yang diproses menjadi format yang bermanfaat bagi penggunaannya. Sekedar pengolahan data belum cukup untuk menghasilkan informasi. Agar informasi menjadi bermanfaat, harus memenuhi tiga kriteria utama: tepat sasaran, tepat waktu, dan bernilai tepat. Informasi yang tidak memenuhi ketiga aspek ini dianggap tidak berguna, atau bahkan diibaratkan sebagai sampah (Irvan, 2021).

Sistem informasi adalah sistem yang menerima data dan instruksi sebagai input, memproses data sesuai instruksi, dan menghasilkan output. Secara lebih luas, menurut Nataniel & Hatta dalam Irvan (2021) sistem informasi pemerintah diartikan sebagai pengembangan dari rangkaian sistem yang

mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang berinteraksi dalam proses terstruktur untuk saling mendukung dalam pengolahan data sehingga menghasilkan informasi.

2.5 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah “pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi lainnya” (Ekaputra, 2021). Pada tahun 2020, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) diluncurkan sebagai sebuah sistem online yang mencakup sistem perencanaan pembangunan, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan dan pengawasan daerah lainnya. SIPD memberikan gambaran umum mengenai daerah - daerah di seluruh Indonesia dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya bersama masyarakat lainnya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Rizki, 2023).

Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bertujuan untuk memastikan manajemen informasi daerah berjalan secara profesional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah menyediakan informasi terkait pemerintahan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta memungkinkan pengelolaan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Kebutuhan untuk memperbaharui proses perencanaan pembangunan, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan tuntutan untuk transparansi informasi publik, mendorong Pemerintah untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Hal ini mengarah pada penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, yang

mengatur teknis pengelolaan SIPD untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini (Irfan, 2021).

Pemerintah daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat menggunakan SIPD untuk mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih berkualitas, cepat dan inovatif. Sistem ini menyajikan data pembangunan tiap daerah secara interaktif dan dilengkapi dengan analisisnya. Tampilan visual SIPD memudahkan pengguna memahami data yang ditampilkan tanpa harus membaca teks atau tabel yang monoton. Data dan informasi pembangunan daerah merupakan hal yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Winarno dalam Rizki (2023) SIPD berperan penting dalam mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, SIPD juga berperan dalam mendorong sinkronisasi data antara pusat dan daerah untuk mencapai single database nasional. Oleh karena itu, penggunaan SIPD perlu dioptimalkan untuk mendukung tercapainya sinkronisasi yang efektif dan efisien dalam pembangunan pusat dan daerah. *E-Database* merupakan aplikasi online yang digunakan untuk mencatat dan mengelola data dan informasi mengenai kondisi daerah. Tujuan Kementerian Dalam Negeri menerapkan SIPD adalah untuk memudahkan daerah dalam merencanakan dan menganggarkan dengan menggunakan sistem aplikasi yang terpadu (Ekaputra, 2021).

Tahapan dari proses perencanaan dalam pengisian SIPD adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu 1-5 tahun.
2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 tahun.
3. Menyusun pra Rencana Kerja Anggaran (RKA), yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program,

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD dan rencana pendapatan dan kegiatan OPD.

4. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Prafon Anggaran Sementara (PPAS).
5. Mengisi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD).
6. Mengisi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

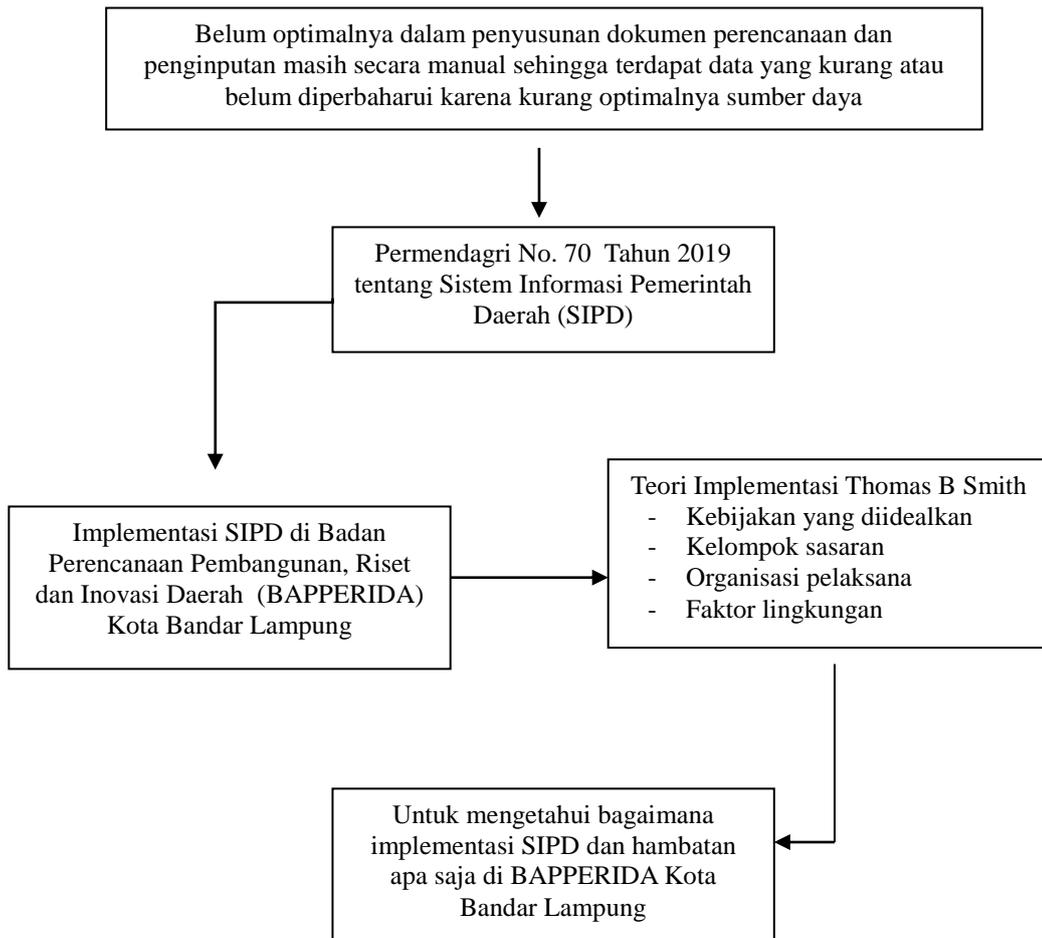
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 SIPD melihat dari kategori informasi perencanaan pembangunan daerah, bahwa SIPD dapat mengelola informasi dan data yang erkait dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan utama. SIPD dapat membantu pembuatan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, sehingga memudahkan dalam memperoleh analisis dan profil pelaksanaan pembangunan daerah serta menjadi landasan pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Keadaan topografi daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah diawali dari data pembangunan hasil musrenbang tingkat kelurahan kecamatan lalu tingkat OPD dan ditentukan oleh prioritas pembangunannya berdasarkan tema RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun perencanaan pembangunan atau tahun depan lalu dihimpun oleh Bapperida sebagai koordinator perencanaan dan pembangunan ditingkat kota yang akan dikerjakan ditahun rencana atau tahun $n+1$ atau tahun depan.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai bahan landasan dalam pengembangan konsep dan teori dalam penelitian yang didasarkan pada latar belakang, tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pikir dapat diartikan sebagai rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisannya.

Dalam penelitian ini, menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Thomas B Smith yang memiliki 4 indikator yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, serta faktor lingkungan. Melalui 4 indikator ini peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi SIPD tersebut yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung.



Gambar 2. Kerangka Pikir

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Menurut Lodico, Spauldin dan Voegtle dalam Riska (2022) penelitian kualitatif adalah berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara kepada perasaan dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan kepada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari pengalaman pengetahuan sosial yaitu suatu proses ilmiah yang sah. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memperkaya pemahaman dan menemukan pengetahuan baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan berupa angka-angka.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, catatan ilmiah dan dokumen resmi. Penelitian kualitatif juga digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian melalui deskripsi berupa kata-kata (Moloeng dalam Rizki, 2023). Selain menghasilkan data, penelitian kualitatif juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan wawasan yang bermakna. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, peneliti bermaksud menjelaskan implementasi SIPD dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Bappeda dalam penggunaan SIPD.

3.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi aplikasi SIPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dari masalah tersebut maka peneliti memfokuskan masalah penelitian dimana kebijakan diimplementasikan sejalan dengan pandangan Thomas B. Smith, bahwa implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan ini diformulasikan kedalam program atau sistem, sehingga kebijakan ini dapat diukur melalui program dengan melihat dampak terhadap sasarannya.

3.2.1. Capaian Implementasi Kebijakan

Capaian implementasi kebijakan publik dimaknai dengan hasil dari tahapan-tahapan selama proses implementasi itu dilaksanakan atau juga dapat dimaknai sebagai sebuah pedoman untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan. Adapun capaian implementasi kebijakan berdasarkan proses tahapan implementasi kebijakan menurut Mulyadi dalam Azra 2022 pada penelitian implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Badan Perencanaan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika pada tahap pengesahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan kebijakan tersebut dan tepat sasaran pada pelaksanaannya.
- b. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika kelompok sasaran dari kebijakan SIPD ini memahami, bisa menjalankan kebijakan SIPD tersebut, dan dapat menggunakannya dengan baik sesuai dengan output pelaksanaan kebijakan SIPD tersebut.

- c. Indikator implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil ketika pada saat implementasi kebijakan mampu membawa perubahan menjadi efektif dan efisien.

3.2.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan, maka Thomas B. Smith memiliki empat indikator, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan.

- a. Kebijakan yang diidealkan, dalam hal ini tujuan dalam perumusan kebijakan yaitu untuk mendorong, mempengaruhi target sasaran dan menganalisis penerapan kebijakan mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari kebijakan yang telah dibuat Kemendagri, sehingga dapat mengukur kinerja implementasi kebijakan tersebut.
- b. Kelompok sasaran, dalam penelitian ini kelompok sasaran yaitu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dimana menjadi sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini akan menganalisis bagaimana bagaimana dukungan dan ketanggapan implementor dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- c. Organisasi pelaksana yaitu organisasi atau badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, dalam penelitian ini BAPPERIDA Kota Bandar Lampung menjadi penanggung jawab atau admin dari aplikasi SIPD. Dalam hal ini, menganalisis terkait dengan bagaimana perkembangan, keefektivitasan, kendala-kendala selama menggunakan atau mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- d. Faktor lingkungan, dalam hal ini berfokus kepada analisis pada faktor yang berasal dari luar lingkungan dalam pelaksanaan aplikasi SIPD di Bappeda Kota Bandar Lampung, seperti faktor ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi dan faktor sosial berdasarkan bagaimana sosialisasi yang

dibuat untuk penerapan aplikasi SIPD, apakah lingkungan sosial mendukung atau menentang adanya kebijakan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya terhadap apa yang hendak diteliti. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di BAPPERIDA dikarenakan salah satu tugas dan fungsi BAPPERIDA adalah sebagai lembaga teknis daerah dalam penerapan aplikasi SIPD dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan antara lain:

- 1) Data Primer merupakan data yang didapat langsung oleh pencari data (peneliti) dari objek penelitiannya sehingga data tersebut bersifat faktual karena langsung dari peneliti. Dalam Sinambela (2012) data primer dalam penelitian adalah berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Untuk mendapatkannya, peneliti menggunakan dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen dengan hasil data yang didapatkan dalam proses ini berupa hasil rekaman suara atau catatan dari kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan hasil dalam bentuk gambar diperoleh dari kegiatan studi dokumen.

- 2) Data sekunder dalam Sinambela (2012) adalah data tertulis yang diperoleh dari sumber buku dan majalah ilmiah, arsip-arsip pribadi, foto, berita, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi menurut Nasition dalam Azra (2022) merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dimana para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan fakta, data yang didapatkan melalui observasi secara langsung. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung subjek penelitian, termasuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAPPERIDA Kota Bandar Lampung. Peneliti dapat mengidentifikasi informan yang akan menjadi subjek penelitian dan juga dapat mengetahui nama, umur, jabatan, fungsi/aktivitas calon informan sehingga mudah memperoleh informasi untuk keperluan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan bermaksud mendapatkan gambaran lengkap. Informan dalam kegiatan wawancara tertuju kepada pegawai yang berperan penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta pengguna SIPD di kantor BAPPERIDA Kota Bandar Lampung dan di salah satu dinas yang menggunakan SIPD

Tabel 2. Data Informan Wawancara dalam Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Yusman Kunang, S.Sos	Sekretaris Bappeda Kota Bandar Lampung
2	Rozi A. Jamain, S.TP	Fungsional Perencana Bidang Data dan Informasi
3	Sugandi Z.A, S.Kom., M.M	Pelaksana/ Admin SIPD Bappeda Kota Bandar Lampung
4	Nico yanuar pratama, S.Sos	Fasilitator SIPD Bappeda Kota Bandar Lampung
5	Indah Lestari, SE	Fasilitator SIPD Bappeda Kota Bandar Lampung
6	Yonia Ivana, SE., MM	Operator SIPD Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Fery Amthoni, S.U	Operator SIPD Kelurahan Penengahan Raya
8	Diding Sagita, SE., MM	Operator SIPD Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

(Sumber : Dikelola Oleh Peneliti, 2024)

c. Studi Dokumen

Studi dokumen atau dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan telaah pustaka, baik dalam bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang yang mana dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan peneliti:

Tabel 3. Dokumen yang dijadikan bahan analisis

No	Nama Dokumen
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2	Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
5	Dokumen cetak e-database SIPD
6	Gambar Tampilan SIPD Kota Bandar Lampung
7	Susunan Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2024
8	Buku, Jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian

(Sumber : Dikelola Oleh Peneliti, 2023)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data-data kedalam sebuah pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema hingga bisa merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data dianggap jenuh. Kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang memilih, memfokuskan data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, survei kepuasan pelanggan, dan lain-lain, cenderung sangat kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya seluruh data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu data yang sangat penting, data yang kurang penting, dan tidak penting. Data yang kurang penting dapat dihapus untuk menyimpan data penting saja. Hal ini memungkinkan data yang tersedia menjadi lebih sederhana, lebih relevan dengan kebutuhan penelitian, dan mampu mewakili keseluruhan data yang dikumpulkan. Dengan cara ini data akan lebih mudah diolah ke tahap berikutnya dan diubah menjadi informasi yang dapat dipahami, jelas dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

b. Penyajian Data

Menurut Miler dan Huberman, penyajian data dapat dipahami sebagai kumpulan informasi yang terstruktur, dimana memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Data disajikan agar seluruh gambar atau setiap bagian dari keseluruhan gambar yang diperoleh dapat dilihat. Pada fase ini penelitian dimulai dengan mengkategorikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama yang diteliti dan mengkodekan setiap submasalah.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan bagian satu dari aktivitas pertama yang utuh. Data yang telah disusun dan dikelompokkan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dengan teknik atau pola tertentu. Kesimpulan tersebut dapat diungkapkan dalam laporan penelitian dan ditempatkan pada bagian penutup agar pembaca juga dapat menemukan kesimpulan tersebut.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Teknik keabsahan dilakukan untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar (Harahap, 2020). Licoln dan Guna dalam buku Harahap (2020) memberikan standar keabsahan data penelitian kualitatif sebagai berikut :

a. **Uji Kredibilitas**

Dengan melakukan uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dimana dalam tringulasi dilakukan dengan mengecek sumber data dan metode pengumpulan daya yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan bagaimana BAPPERIDA berkoordinasi dengan OPD terkait. Peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melakukan wawancara dan pengamatan kembali dengan sumber data yang sudah ditemui sebelumnya maupun yang baru.

b. **Uji Keteralihan**

Uji keteralihan menunjukkan hasil penelitian melalui uraian yang rinci. Uraian yang rinci dapat membantu pembaca memahami masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, implementasi SIPD dalam koordinasi BAPPERIDA dengan OPD akan dilaporkan secara rinci dan jelas mengacu pada fokus penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami temuan penelitian ini.

c. Uji Ketergantungan

Untuk melakukan uji ketergantungan pada penelitian kualitatif adalah dengan cara menguji keseluruhan proses penelitian, pengujian ini dilakukan oleh auditor atau pembimbing terhadap seluruh aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan fokus dari permasalahan penelitian ini sampai pada kesimpulannya, setelah itu peneliti akan mendiskusikan hasil penelitian ini dengan pembimbing.

d. Uji Kepastian

Uji kepastian digunakan untuk membuktikan apakah hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diperoleh (Harahap, 2020). Penelitian sudah mencukupi standar apabila hasil dalam penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian tersebut.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan SIPD pada Bapperida Kota Bandar Lampung dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam penerapan menggunakan SIPD ini sudah diimplementasikan dengan baik, hal ini dikarenakan bahwa pengimplementasian SIPD ini mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini juga Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai tim pelaksana atau tim admin dalam mengimplementasikan SIPD ini sangat aktif dalam melakukan tugasnya sebagai admin atau fasilitator dengan memberikan pembelajaran atau bimbingan dan memberikan informasi melalui komunikasi yang baik kepada OPD dalam implementasi kebijakan ini. Hasil dari komunikasi yang baik ini, Bapperida dapat menjalankan SIPD ini sampai sekarang dengan baik, dan juga mengkoordinir para operator pengguna SIPD.
2. Masih menjadi hambatan dalam penerapan SIPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah adalah sistem yang masih sering mengalami *error* dan juga sinyal yang kurang maksimal sehingga terkadang menjadi menghambat proses penginputan data kedalam SIPD. Kemudian sarana dan prasana seperti komputer belum cukup memadai baik di Bapperida maupun di perangkat daerah sehingga mengharuskan menggunakan laptop pribadi untuk mengimplementasikan SIPD.

3. Masih terdapat SDM yang kurang berkompeten dalam pengoperasian SIPD, masih belum efektif ataupun belum maksimal pelaksanaannya, masih terdapat operator yang terlambat dalam pengimputan sehingga melewati batas pengisian data di SIPD dikarenakan masih ada operator yang kurang memahami atau daya tangkapnya untuk menggunakan teknologi dalam sistem ini kurang atau pada saat pelatihan tidak datang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan SIPD pada Bapperida Kota Bandar Lampung sebagaimana hasil kesimpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan optimal, maka peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas merupakan modal utama dalam penggerak suatu organisasi dan merupakan *self control* dalam dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern. Maka dari itu dibutuhkan SDM yang berkualitas yang memiliki integritas kerja dan dapat memahami sistem yang digunakan
2. Dibuatkan evaluasi secara rutin dan berkala agar keterisian data perencanaan pembangunan di SIPD dapat terisi secara menyeluruh dan dapat melihat progres dari setiap operator
3. Untuk fasilitas yang mendukung sumber daya, diperlukan *upgrade* paket berlangganan atau penambahan *router*/perangkat jaringan untuk menjamin kestabilan jaringan saat digunakan secara bersamaan, terutama pada ruangan yang jauh dari perangkat jaringan

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Ariska. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Alfani, Dela. Nasution, Juliana. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6. No.1, hal. 4036-4043.
- Apniwansyah, G., Widiantara, I. P., & Pathiassana, M. (2022). Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 11(1), 96 - 108.
- Azra Maidearnis. (2022). Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG*.
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 150–164. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.581>
- EGA, PUTRINA. (2023). Analisis Penerapan E-Government Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) (Studi Pada Bappeda Kabupatenpringsewu). *FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG*.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21. Available at: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/otonomi/article/view/1606>
- Fahzura, laudy. Najamudin. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.35308/xxxxx>
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF*. Medan: Wal Ashri Publishing.

- Islamiyah, D., Fakhriannor, & Herman, M. (2021). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021. Doctoral Dissertation.
- Indonesia (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Indonesia.
- Indonesia (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- Indonesia (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Lumbantobing, S.L. Kusmanto, H & Ginting, B. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. *PERSPEKTIF*, 11(4): 1546-1558.
- Manurung, E. D., Sembiring, S. N. R., & Sulistyani, W. (2019). Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Perilaku Anti Korupsi. *Veritas et Justitia*, 5(2), 399–420. DOI:[10.25123/vej.3614](https://doi.org/10.25123/vej.3614)
- Mulyadi, D. (2016). *Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Praktek*. Penerbit Erlangga.
- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Dicitak oleh PT Leutika Nouvalitera; Yogyakarta.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Permadi, R., Yusuf, M., & Sari, DW (2023). IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR BPBD MURATARA. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* .

- Putra, E., Putra, R. R., & Fachri, B. (2023). SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEBSITE . Penerbit Tahta Media. Retrieved from <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/100>
- Putri, R.K. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- RISKA WIDI ASTUTI. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 Di Bappeda Provinsi Lampung. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Rizki, Nanda Pratama. (2023). implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dalam Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Sejati, Dini Setyaningrum. & Anwaruddin. (2020). Implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas Kecamatan Kutusari Kabupaten Purbalingga. MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi. Vol.17, No.2.
- Silviani, I., Pardede, I. F., & Sembiring, D. C. (2020). Komunikasi Krisis Dalam New Normal. MESSAGE: JURNAL KOMUNIKASI, 9(1).
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, 3(2), 97–112.
- Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Locus Majalah Ilmiah FISIP, 11(2), 1–22. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/284>
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung. CV. Alfabeta)
- Sulistiowati, R. (2014). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB): Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Sosiohumaniora: Journal of

Social Sciences and Humanities, 16(3), 270–281.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i3.5767>

- Sundari, S., Woro Astuti, S., & Endarti, E. W. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) KABUPATEN PROBOLINGGO. MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik), 6(4), 433-440. <https://doi.org/10.37504/map.v6i4.585>
- Sunyata, Lina. & Patriani, Ira. Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 TAHUN DI Desa Bati Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. Publik A, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik. <http://jurnal.fisipuntan.org>
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.) (1st ed.). Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung. https://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/02/implementasi_kebijakan_publik_t.pdf
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Perintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). JURNAL EKSEKUTIF, 2(5).
- Yunas, N. S. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387>